



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2019 – 2020.
Masa Reses ke-	: IV (Keempat).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja (Fisik dan Virtual)
Dengan	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Hari/Tanggal	: Senin, 22 Juni 2020.
Pukul	: 09.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (Secara Virtual menggunakan Zoom)
Pimpinan Rapat	: Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti, SS/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.H., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RKA K/L dan RKP Tahun 20212. Rencana Induk Pendidikan3. Relaksasi UKT dan Pembiayaan Operasional Sekolah Swasta4. Kebijakan Masuk Sekolah Dalam Persiapan New Normal
Hadir Komisi X DPR RI	: 44 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Nadiem Anwar Makarim, Mendikbud RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI secara virtual dibuka pada pukul 9.15 WIB oleh **Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI** dilanjutkan oleh **Agustina Wilujeng Pramestuti, SS/Wakil Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Mendikbud RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN. BIDANG ANGGARAN

1. Kemendikbud RI menyampaikan alokasi pagu indikatif pada RAPBN TA 2021 sebesar **Rp75.094.499.625.000-**. (*Tujuh puluh lima triliun sembilan puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribua rupiah*), dengan rincian sbb:

(dalam ribuan rupiah)

NO	UNIT ESELON 1	PAGU INDIKATIF
1	Sekretariat Jenderal	29.296.625.696
2	Inspektorat Jenderal	211.127.401
3	Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	3.342.407.446
4	Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan	831.414.306
5	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	491.524.767
6	Ditjen Kebudayaan	1.482.416.445
7	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	2.256.898.512
8	Ditjen Pendidikan Tinggi	30.159.972.844
9	Ditjen Pendidikan Vokasi	7.022.112.208
	TOTAL	75.094.499.625

2. Terhadap pagu indikatif Kemendikbud RI pada RAPBN TA 2021 sebagaimana angka 1 di atas, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan:
 - a. Bahan paparan belum secara komprehensif menjelaskan mengenai arah kebijakan, program kerja dan program-program prioritas Kemendikbud RI pada pagu Indikatif RAPBN TA 2021.
 - b. Kemendikbud RI perlu menyampaikan kepada Bappenas RI bahwa Indeks Pembangunan Indonesia harus memasukkan kesehatan, pendidikan dan daya beli.
 - c. Mendorong Kemendikbud RI untuk melakukan penambahan kuota KIP dan KIP Kuliah pada APBN TA 2021.
3. Komisi X DPR RI dan Kemendikbud RI sepakat akan melakukan pendalaman materi rancangan RKA K/L dan RKP dengan Eselon I Kemendikbud RI dalam waktu dekat dengan melengkapi data anggaran beserta kajian kualitatif dan kuantitatif terhadap penetapan sasaran dan satuan biaya setiap program dan kegiatan dalam RAPBN TA 2021.

BIDANG PENGAWASAN

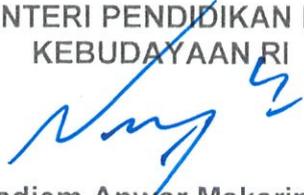
1. Komisi X DPR RI Mendorong Kemendikbud RI untuk menyampaikan data mengenai peta perkembangan dan hasil evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan selama masa pandemi Covid-19, seperti PJJ, KIP, Kurikulum, BOS, pendidikan perjenjang, jalur dan perjenis, dan Implementasi Merdeka Belajar, sebagai rujukan dalam pembahasan kebijakan-kebijakan pendidikan ke depan.
2. Komisi X DPR RI mendukung adanya profil Pelajar Pancasila dan mendorong Kemendikbud RI untuk menyempurnakannya, antara lain dengan menentukan indikator capaiannya sesuai amanah UUD NRI 1945 Pasal 31 ayat (3).

3. Komisi X DPR RI mengapresiasi terbitnya Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020, dengan perlunya penekanan dari Kemendikbud RI untuk meningkatkan sosialisasi dan melakukan evaluasi serta pengawasan secara terus-menerus, divalidasi konsistensinya sesuai aturan dan menekankan pihak perguruan tinggi untuk memiliki data yang akurat.
4. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk melakukan kajian atau revisi terhadap besaran dana KIP dan KIP Kuliah agar disesuaikan dengan kenaikan indeks kebutuhan operasional perguruan tinggi.
5. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk mengedepankan pertimbangan nilai-nilai kebhinekaan, landasan hukum dan administrasi kelembagaan dalam melakukan kerja sama dengan lembaga penyiaran swasta terkait pengadaan konten pendidikan.
6. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk merumuskan kebijakan terkait Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang selama masa pandemi Covid-19 tidak dapat melakukan pembukaan tahun pelajaran atau terkendala dalam pembiayaan.
7. Komisi X DPR RI mengapresiasi Kemendikbud RI yang telah melakukan perubahan kebijakan BOS (BOS Afirmasi dan BOS Kinerja dapat dialokasikan untuk sekolah swasta). Selanjutnya Komisi X DPR RI menekankan agar dilakukan pengawasan secara intensif agar tidak terjadi penyimpangan/penyalanggunaan dalam realisasinya.
8. Komisi X DPR RI mengapresiasi Kemendikbud RI mengenai kebijakan pembukaan tahun pelajaran selama pandemi Covid-19 dengan mempertimbangkan pembelajaran daring di zona merah, kuning dan oranye, serta pembelajaran tatap muka bertahap pada zona hijau. Selanjutnya meminta Kemendikbud RI untuk melakukan evaluasi terus menerus dan mengkonsiderasi kurikulum, khusus di masa Pandemi Covid-19.
9. Terhadap Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) yang akan segera dilaksanakan pada bulan Juli 2020, Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk berkoordinasi dengan pemda agar ada solusi terhadap kekhawatiran terjadinya gelombang baru yang terpapar Covid-19.
10. Komisi X DPR RI dan Kemendikbud RI perlu membahas dan memberikan masukan terhadap substansi undang-undang dalam pembahasan *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja, khususnya terkait substansi bidang pendidikan.
11. Komisi X DPR RI dan Kemendikbud RI sepakat akan melakukan Raker yang secara khusus membahas Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035.
12. Komisi X DPR RI mengharapkan Kemendikbud RI untuk menyampaikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan anggota Komisi X DPR RI yang belum terjawab paling lambat 1 Juli 2020.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.41 WIB.

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN RI


Nadiem Anwar Makarim

KETUA RAPAT,


Agustina Wilujeng Pramestuti, SS